

**Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2013-2017**

*Analysis of Financial Local Performance of Regencies/Municipalities in South
Kalimantan in 2013-2017*

Gabby Febryanti Sahara*, Muzdalifah

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

[*gabby16sahara@gmail.com](mailto:gabby16sahara@gmail.com)

Abstract

The aim research (1) to know local financial performance with ratio of fiscal decentralization degree, local financial independent, effectiveness of PAD, local finance efficiency and growth PAD regencies/municipalities in South Borneo province 2013-2017, (2) to know business sector which contributed in PDRB. Technical analysis data is descriptif analysis. The result research showed : by average fiscal decentralization degree ratio 9 regencies still very less and 4 regencies/cities less, 7 regencies low, average local financial independence 4 regencies still very low, 7 regencies low and 2 municipalities enough independence, average effectiveness PAD ratio almost all of regencies/municipalities very effective except Banjarmasin municipality are effective, average local financial efficiency ratio 9 regencies/municipalities less efficient and 2 regencies enough efficient, while Banjarbaru municipalities inefficient, growth PAD ratio is positive.

Keywords: *fiscal decentralization degree ratio, local financial independence ratio, effectiveness of PAD ratio, local financial efficiency ratio, PAD growth ratio.*

Abstraksi

Tujuan penelitian (1) untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, dan pertumbuhan PAD kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan 2013-2017, (2) untuk mengetahui sektor lapangan usaha yang berkontribusi dalam PDRB. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Jenis data adalah data sekunder. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal 9 kabupaten masih sangat kurang dan 4 kabupaten/kota kurang, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 4 kabupaten masih sangat rendah, 7 kabupaten rendah dan 2 kota cukup mandiri, rata-rata rasio efektivitas PAD hampir semua kabupaten/kota sangat efektif kecuali kota Banjarmasin efektif, rasio efisiensi keuangan daerah 9 kabupaten/kota kurang efisien dan 2 kabupaten cukup efisien, sedangkan kota Banjarbaru tidak efisien, rasio pertumbuhan PAD bernilai positif.

Kata Kunci: Rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD.

Pendahuluan

Pengelolaan fiskal daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah telah mengalami perubahan-perubahan mendasar seiring dengan berjalannya waktu yang melalui perubahan

peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam mengatur otonomi daerah dimana terlihat dari kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah yang telah bergeser. Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting yaitu menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, menyampaikan pertanggungjawaban pemerintahan yang salah satunya dapat melalui penyampaian laporan keuangan daerah untuk dapat menilai apakah kinerja pemerintah daerah tersebut sudah berhasil atau masih belum.

Salah satu provinsi di negara Indonesia yang merupakan provinsi kaya sumber daya alam yaitu provinsi Kalimantan Selatan dimana provinsi tersebut terdiri dari berbagai daerah yang berjumlah 11 kabupaten dan 2 kota dengan segala potensi ekonomi yang tersedia dapat memberikan pengaruh terhadap keuangan karena potensi ekonomi yang ada mampu memberikan pemasukan bagi daerah dan pemasukan tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan publik dan peningkatan barang publik di daerah. Maka untuk itu, analisis terhadap kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang penting terutama pada kinerja pemerintah daerah pada periode tertentu pada pengelolaan keuangan daerah baik itu berhasil atau belum berhasil serta dampak yang diiberikan tersebut apakah itu dapat mensejahterakan atau masih belum dapat mensejahterakan masyarakat. Sehingga judul penelitian ini adalah “**Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017**”

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- (1) Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisien keuangan daerah, keuangan daerah dan rasio pertumbuhan PAD kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan 2013-2017?
- (2) Bagaimanakah hubungan keuangan daerah pada sektor lapangan usaha yang berkontribusi paling besar dalam PDRB pada kabupaten/kota tersebut?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013-2017 (2) untuk mengetahui

hubungan kinerja keuangan daerah dengan kondisi sektor lapangan usaha yang berkontribusi paling besar dalam PDRB kabupaten/kota tersebut.

Tinjauan Pustaka

Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran (LRA) adalah salah satu jenis dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang telah direalisasikan pemerintah daerah dimana masing-masing akun dibandingkan dengan anggaran target pada suatu periode tersebut. Kegunaan LRA dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi periode mendatang dengan penyajian yang kompratif dan disajikan sedemikian rupa.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Halim (2007:231) menjelaskan analisis keuangan merupakan usaha untuk dapat mengidentifikasi pada ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang telah disediakan. Keuangan pemerintahan daerah berbeda dengan swasta dimana penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangannya yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan keuangan daerah tersebut dan prinsip penyusunannya pun sesuai dengan aturan baku standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan maka untuk dapat melihat lebih dalam informasi keuangan daerah tersebut dilakukan analisis keuangan daerah dengan analisis rasio keuangan daerah yang menurut Putra (2018:60) memiliki kegunaan menilai kemandirian keuangan daerah, mengukur efektivitas, mengukur aktivitas pemerintah, dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yaitu *output* atau hasil keluaran yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam penggunaan anggaran yang telah terukur baik secara kualitas dan kuantitas pada keuangan pemerintahan daerah tersebut. Pengukuran kinerja keuangan daerah oleh (Halim, 2007:230) dilakukan dengan tujuan menilai kemandirian, mengukur efektivitas dan efisiensi, mengukur aktivitas pemerintahan, mengukur kontribusi sumber pendapatan, dan melihat pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran.

Penelitian Sebelumnya

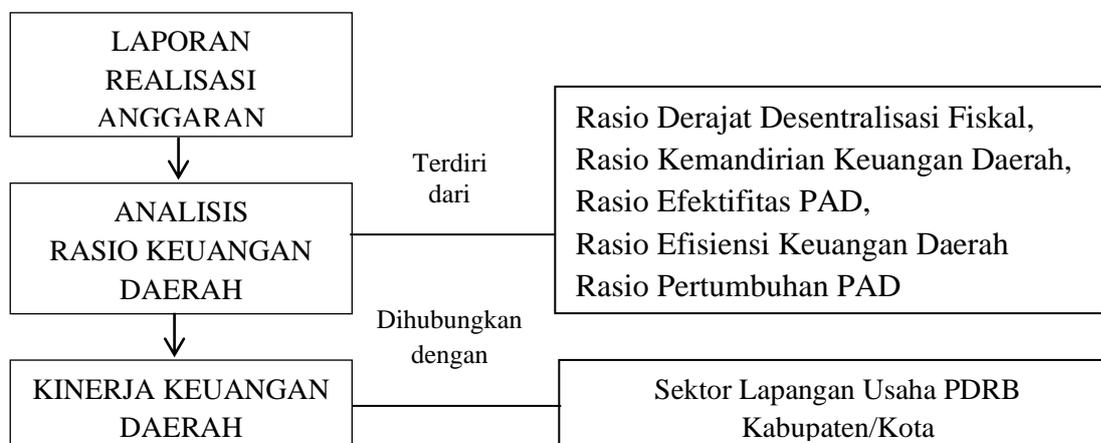
Penelitian terdahulu dari Mutiha (2016) menunjukkan kinerja keuangan daerah kabupaten kota Bogor tahun 2010-2014 memiliki rasio kemandirian yang konsultatif,

realisasi PAD sangat efektif dan rasio pertumbuhan positif, namun prioritas anggaran masih pada belanja tidak langsung daripada belanja langsung.

Penelitian Nurhayati (2015) menunjukkan kinerja pemerintah kabupaten Rokan Hulu menunjukkan rasio kemandirian sangat rendah, rasio ketergantungan sangat tinggi, rasio efektivitas sangat efektif dan rasio efisiensi sangat efisien, rasio aktivitas menunjukkan belanja rutin lebih diprioritaskan daripada belanja pembangunan dan rasio pertumbuhan PAD terjadi peningkatan berfluktuasi dari tahun 2009-2012.

Penelitian Bisma dan Susanto (2010) pada kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi NTB tahun 2003-2007 menunjukkan ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi dari pusat sehingga kemandirian daerah sangat kurang, desentralisasi fiskal cukup, efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensinya tidak efisien, sumbangan PAD (*share*) terhadap total pendapatan daerah provinsi masih rendah, namun pertumbuhan PAD-nya tinggi, dan tingkat kemampuan keuangan daerah tinggi.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

Sumber : Gambar diolah

Metode Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013-2017 dan menghubungkannya dengan sektor lapangan usaha PDRB kabupaten/kota tersebut.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah suatu ukuran perbandingan antara kontribusi PAD terhadap keseluruhan penerimaan yang diperoleh daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah suatu ukuran perbandingan besarnya tingkat kemampuan keuangan daerah diukur menggunakan PAD terhadap bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintah daerah terutama dari pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektifitas PAD adalah suatu ukuran perbandingan antara besarnya realisasi pendapatan PAD yang diterima pemerintah daerah dengan potensi pendapatan PAD yang direncanakan oleh pemerintah daerah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah adalah suatu ukuran perbandingan untuk mengetahui besarnya tingkat pengeluaran belanja pemerintah daerah terhadap pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah.

Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan PAD adalah suatu ukuran untuk menunjukkan besarnya tingkat pertumbuhan jumlah PAD yang diterima pada periode saat ini dibanding dengan periode tahun sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan cara meminta data ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan mengunduh data di situs DJPK Kemenkeu RI.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan.

Menurut Putra (2018:62) rumus yang digunakan untuk menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal yaitu:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (Persen)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah (Permendagri 86 Tahun 2017)

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Tabel 2
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Persen)	Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah
<10,00	Sangat rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber Kriteria : Tim Litbag Depdagri – Fisipol UGM 1991

Menurut Putra (2018:64) rumus yang digunakan untuk perhitungan rasio efektivitas PAD yaitu:

$$\text{Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3
Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD (Persen)	Kriteria Efektifitas
Diatas 100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
Di bawah 60	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbag Depdagri – Fisipol UGM 1991

Menurut Halim (2007:234) rumus menghitung efisiensi keuangan daerah yaitu:

$$\text{Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (Persen)	Kriteria Efisiensi
Di atas 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Kurang dari 60	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri Nomor: 690.900.327 tahun 1996

Menurut Putra (2018:68) rumus untuk menghitung pertumbuhan PAD yaitu:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_{Akhir} - PAD_{Awal}}{PAD_{Awal}} \times 100\%$$

Hasil dan Analisis

Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 5
Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017
(Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata	Keterangan
Tanah Laut	8,45	11,17	11,20	10,13	10,69	10,33	Kurang
Kotabaru	8,45	8,67	10,70	9,63	9,07	9,30	Sangat Kurang
Banjar	15,56	13,07	11,49	11,09	13,45	12,93	Kurang
Barito Kuala	3,83	7,11	5,94	4,86	6,91	5,73	Sangat Kurang
Tapin	4,49	5,94	5,26	5,07	5,71	5,29	Sangat Kurang
Hulu Sungai Selatan	6,44	9,35	9,02	8,08	11,74	8,93	Sangat Kurang
Hulu Sungai Tengah	6,02	9,52	7,51	5,53	6,44	7,01	Sangat Kurang
Hulu Sungai Utara	5,55	10,08	9,08	7,92	10,89	8,70	Sangat Kurang
Tabalong	7,03	8,32	9,90	8,96	11,91	9,22	Sangat Kurang
Tanah Bumbu	7,84	9,87	9,29	7,93	12,22	9,43	Sangat Kurang
Balangan	4,25	6,85	5,22	3,65	7,83	5,56	Sangat Kurang
Kota Banjarmasin	13,02	15,11	16,06	16,27	21,74	16,44	Kurang
Kota Banjarbaru	10,63	14,70	15,64	17,14	22,44	16,11	Kurang

Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal secara rata-rata berada pada kategori sangat kurang dan kurang. Daerah kabupaten Kotabaru, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu dan Balangan termasuk dalam kriteria sangat kurang dan daerah dengan kriteria kurang terdapat pada daerah kabupaten Tanah Laut, Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 6
Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017
(Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata	Keterangan
Tanah Laut	12,04	16,23	15,83	13,11	15,21	14,48	Rendah
Kotabaru	11,46	11,58	15,41	12,75	12,28	12,64	Rendah
Banjar	22,50	18,39	17,15	15,01	15,73	17,76	Rendah
Barito Kuala	4,83	9,50	7,85	5,94	9,74	7,57	Sangat Rendah
Tapin	5,71	7,51	6,66	6,48	7,50	6,77	Sangat Rendah
Hulu Sungai Selatan	8,26	12,56	12,63	10,66	16,25	12,07	Rendah
Hulu Sungai Tengah	7,85	12,95	10,41	7,36	7,85	9,28	Sangat Rendah
Hulu Sungai Utara	7,54	14,15	13,22	10,25	16,02	12,24	Rendah
Tabalong	9,05	10,76	13,56	11,20	13,57	11,63	Rendah
Tanah Bumbu	11,76	13,43	12,82	10,70	19,17	13,78	Rendah
Balangan	5,13	8,53	6,65	4,29	10,36	6,99	Sangat Rendah
Kota Banjarmasin	20,39	25,69	26,62	22,20	32,34	25,45	Cukup
Kota Banjarbaru	15,11	22,32	23,23	22,75	34,95	23,67	Cukup

Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)

Berdasarkan tabel 6 diatas hasil perhitungan analisis rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata menunjukkan berada dalam kategori tiga kategori yaitu sangat rendah, rendah dan cukup. Kabupaten yang berada dalam kondisi/kategori sangat rendah pada kemandirian keuangan daerahnya yaitu, kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Tengah, dan Balangan. Kabupaten dengan kategori rendah untuk kemandirian keuangan daerahnya terdapat pada kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tanah Bumbu, dan untuk kemandirian keuangan daerah dengan kategori cukup hanya terdapat pada daerah perkotaan yaitu kota Banjarmasin dan Banjarbaru karena rasio kemandirian keuangan daerahnya secara rata-rata lebih dari 20,00 persen.

Efektivitas PAD

Tabel 7
Analisis Rasio Efektivitas PAD
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017
(Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata	Keterangan
Tanah Laut	131,62	142,33	123,32	92,40	81,84	117,19	Sangat Efektif
Kotabaru	124,14	108,22	136,45	82,78	108,60	114,06	Sangat Efektif
Banjar	115,29	105,84	105,09	118,76	128,04	114,72	Sangat Efektif
Barito Kuala	146,38	160,30	122,86	115,79	118,47	135,03	Sangat Efektif
Tapin	122,33	108,48	101,49	92,15	67,92	102,45	Sangat Efektif
Hulu Sungai Selatan	96,37	118,43	106,01	122,67	98,96	106,47	Sangat Efektif
Hulu Sungai Tengah	100,00	94,47	101,31	64,40	43,96	83,98	Sangat Efektif
Hulu Sungai Utara	134,69	144,33	107,13	104,28	94,91	120,01	Cukup Efektif
Tabalong	102,04	101,39	108,76	118,89	89,28	103,73	Sangat Efektif
Tanah Bumbu	128,91	122,75	108,02	80,25	97,00	110,81	Sangat Efektif
Balangan	155,28	142,67	133,84	112,77	112,77	135,43	Sangat Efektif
Kota Banjarmasin	106,19	107,80	91,76	88,82	98,73	99,91	Efektif
Kota Banjarbaru	120,88	133,05	109,39	101,95	105,24	115,23	Sangat Efektif

Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)

Tabel 7 diatas menunjukkan rasio efektivitas PAD pada 11 kabupaten/kota kategori sangat efektif, 1 kabupaten kategori cukup efektif dan 1 kota kategori efektif. Kabupaten/kota kategori sangat efektif antara lain kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan dan kota Banjarbaru, sedangkan kategori efektif yaitu kota Banjarmasin, dan kategori cukup efektif yaitu kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Efisiensi Keuangan Daerah

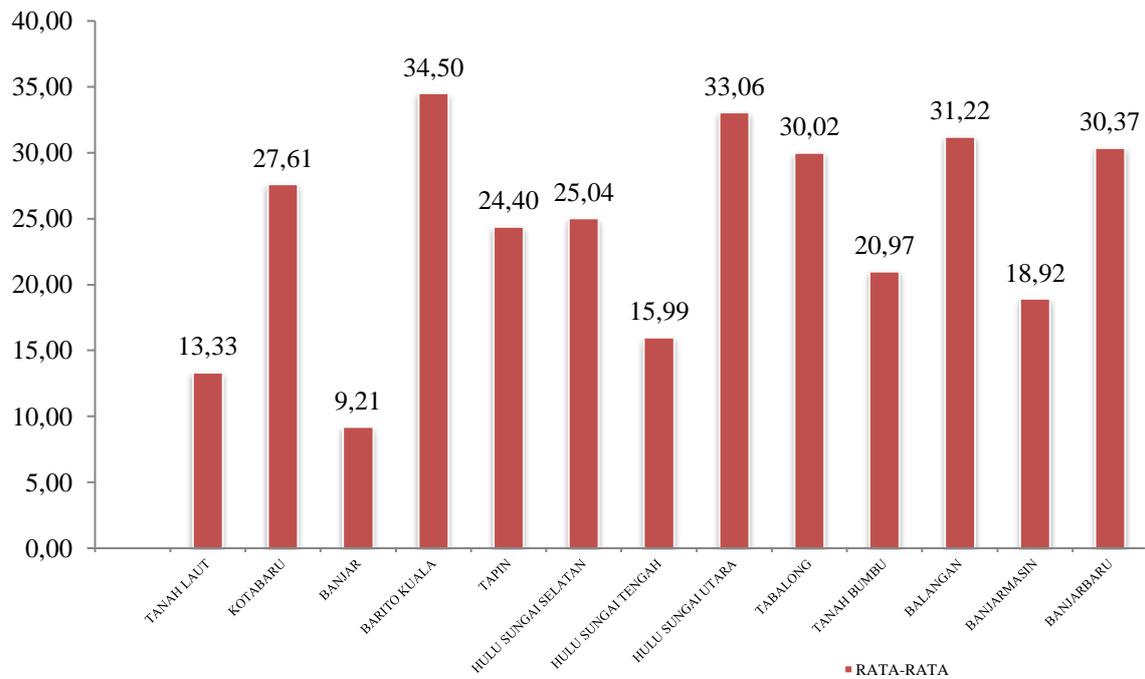
Tabel 8
Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013-2017
(Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata	Keterangan
Tanah Laut	72,83	93,65	105,27	118,22	106,09	99,21	Kurang Efisien
Kotabaru	87,12	92,65	94,11	94,45	88,92	91,45	Kurang Efisien
Banjar	93,61	105,28	92,97	76,97	81,96	90,16	Kurang Efisien
Barito Kuala	91,92	99,11	93,00	88,02	73,24	89,06	Cukup Efisien
Tapin	98,35	92,00	96,42	89,59	88,24	92,92	Kurang Efisien
Hulu Sungai Selatan	90,54	94,62	99,99	81,94	89,60	91,34	Kurang Efisien
Hulu Sungai Tengah	97,40	110,40	93,32	83,90	87,57	94,52	Kurang Efisien
Hulu Sungai Utara	82,09	88,21	88,26	92,27	83,31	86,83	Cukup Efisien
Tabalong	77,47	92,99	92,14	81,64	97,32	88,31	Cukup Efisien
Tanah Bumbu	111,24	111,24	88,90	82,02	84,78	95,64	Kurang Efisien
Balangan	94,00	105,58	87,23	72,27	94,92	90,80	Kurang Efisien
Kota Banjarmasin	96,70	94,94	103,19	98,63	84,13	95,52	Kurang Efisien
Kota Banjarbaru	85,90	97,11	110,28	114,19	98,02	101,10	Tidak Efisien

Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)

Tabel 8 menunjukkan secara rata-rata terdapat 9 daerah dengan kategori kurang efisien, tiga daerah cukup efisien dan satu daerah perkotaan yang kategorinya tidak efisien. Daerah yang berada dalam kategori tidak efisien adalah Kota Banjarbaru, kategori kurang efisien antara lain, Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Kota Banjarmasin, kategori cukup efisien yaitu, Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Utara dan Tabalong.

Pertumbuhan PAD



Gambar 2. Rata-rata- Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2017 (Dalam Persen)

Sumber: Gambar diolah

Pada gambar 2 diatas, hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD perkembangan selama 5 tahun terakhir pertumbuhan PAD secara rata-rata yang menunjukkan bahwa semua Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan yang positif, hal itu berarti bahwa pertumbuhan masing-masing daerah selalu terus meningkatkan PAD-nya setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir walaupun dengan trend yang berfluktuasi, dengan pertumbuhan PAD yang paling tinggi adalah Kabupaten Barito Kuala sebesar 34,50 persen dan yang paling sedikit/rendah pertumbuhan PAD-nya adalah kabupaten Banjar yaitu sebesar 9,21 persen.

Kinerja Keuangan Daerah Dihubungkan Dengan Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 9
Share Kontribusi Sektor Lapangan Usaha yang Dominan pada PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota	Lapangan Usaha	Share (Persen)
Tanah Laut	Pertambangan dan Penggalian	32,77
Kotabaru	Industri Pengolahan	32,15
Banjar	Pertambangan dan Penggalian	21,63
Barito Kuala	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	29,04
Tapin	Pertambangan dan Penggalian	35,39
Hulu Sungai Selatan	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	26,79
Hulu Sungai Tengah	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	26,42
Hulu Sungai Utara	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	17,94
Tabalong	Pertambangan dan Penggalian	56,74
Tanah Bumbu	Pertambangan dan Penggalian	46,09
Balangan	Pertambangan dan Penggalian	69,69
Kota Banjarmasin	Industri Pengolahan	19,17
Kota Banjarbaru	Transportasi Pergudangan	19,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 9 diatas menunjukkan sektor-sektor lapangan usaha yang dominan terhadap PDRB pada daerah tersebut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang sebanyak 6 kabupaten (Tanah Laut, Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan) kemudian disusul sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebanyak 4 kabupaten (Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara), sektor industri pengolahan terdapat pada 2 daerah yaitu kabupaten Kotabaru dan kota Banjarmasin, dan 1 daerah yaitu kota Banjarbaru sektor dominannya adalah transportasi pergudangan.

Tabel 10
Kinerja Keuangan pada Daerah dengan Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2013-2017

Kabupaten/ Kota	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemandirian Keuangan Daerah	Efektifitas PAD	Efisiensi Keuangan Daerah	Rata-rata Perumbuhan PAD
Barito Kuala	Sangat Kurang	Sangat Rendah	Sangat Efektif	Cukup Efisien	34,50%
Hulu Sungai Selatan	Sangat Kurang	Rendah	Sangat Efektif	Kurang Efisien	25,04%
Hulu Sungai Tengah	Sangat Kurang	Rendah	Cukup Efektif	Kurang Efisien	15,99%
Hulu Sungai Utara	Sangat Kurang	Sangat Rendah	Sangat Efektif	Cukup Efisien	33,06%

Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)

Tabel 10 menunjukkan pada kabupaten yang sektor dominannya adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan terlihat derajat desentralisasinya sangat kurang semua, kemandiriannya juga rendah pada kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu

Sungai Tengah dan sangat rendah pada kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara, efektivitas PAD sangat efektif kecuali kabupaten Hulu Sungai Tengah yang efektif, efisiensi keuangan daerah cukup efisien pada kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara serta kurang efisien pada kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, dan rata-rata pertumbuhan PAD berkisar antara 25-35%.

Tabel 11
Kinerja Keuangan Daerah pada Daerah dengan Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2013-2017

Kabupaten/ Kota	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemandirian Keuangan Daerah	Efektivitas PAD	Efisiensi Keuangan Daerah	Rata-rata Perumbuhan PAD
Tanah Laut	Kurang	Rendah	Sangat Efektif	Kurang Efisien	13,33%
Banjar	Kurang	Rendah	Sangat efektif	Kurang Efisien	9,21%
Tapin	Sangat Kurang	Sangat Rendah	Sangat efektif	Kurang Efisien	24,40
Tabalong	Sangat Kurang	Rendah	Sangat efektif	Cukup Efisien	30,02%
Tanah Bumbu	Sangat Kurang	Rendah	Sangat efektif	Kurang Efisien	20,97%
Balangan	Sangat Kurang	Sangat Rendah	Sangat efektif	Kurang Efisien	31,22%

Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)

Tabel 11 menunjukkan kabupaten dengan sektor dominannya pertambangan dan penggalian terlihat bahwa derajat desentralisasi fiskal masih kurang pada kabupaten Tanah Laut dan Banjar serta sangat kurang pada kabupaten Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu dan Balangan, kemandirian keuangan daerah sangat rendah pada kabupaten Tapin dan kabupaten Balangan serta sangat rendah pada kabupaten Tanah Laut, Banjar, Tabalong dan Tanah Bumbu. Efektivitas PAD semua kabupaten efektif, efisiensi keuangan daerah hanya kabupaten Tabalong yang kurang efisien sedangkan sisanya efisien semua, rata-rata pertumbuhan PAD berkisar antara 9-31 persen.

Tabel 12
Kinerja Keuangan Daerah pada Daerah dengan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2013-2017

Kabupaten/ Kota	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemandirian Keuangan Daerah	Efektivitas PAD	Efisiensi Keuangan Daerah	Rata-rata Perumbuhan PAD
Kotabaru	Sangat Kurang	Rendah	Sangat Efektif	Kurang Efisien	27,61%
Banjarmasin	Kurang	Cukup	Efektif	Kurang Efisien	18,92%

Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)

Tabel 12 diatas menunjukkan kinerja keuangan daerah berdasarkan kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan derajat desentralisasi fiskal kabupaten Kotabaru masih

sangat kurang, kemandirian keuangan daerah rendah, efektivitas PAD sangat efektif, efisiensi kurang efisien, dan rata-rata pertumbuhan 27,61%. Kota Banjarmasin mempunyai derajat desentralisasi kurang, kemandirian keuangan daerah cukup, efektivitas PAD efektif, efisiensi kurang efisien dan rata-rata pertumbuhan PAD 18,92%.

Tabel 13
Kinerja Keuangan Daerah pada Daerah dengan Sektor Transportasi dan Pergudangan Tahun 2013-2017

Kabupaten/ Kota	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemandirian Keuangan Daerah	Efektifitas PAD	Efisiensi Keuangan Daerah	Rata-rata Perumbuhan PAD
Banjarbaru	Kurang	Cukup	Sangat Efektif	Tidak Efisien	30,97%

Sumber : DJPK dan Bakeuda Prov. Kalsel (data diolah)

Tabel 13 diatas menunjukkan kinerja keuangan daerah berdasarkan kontribusi sektor dominan transportasi pergudangan terlihat bahwa derajat desentralisasi kurang, kemandirian keuangan daerah cukup, efektivitas PAD sangat efektif, efisiensi keuangan daerah tidak efisien dan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 30,97%.

Penutup

Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa pada rasio derajat desentralisasi fiskal masih sangat kurang dan kurang yang menandakan bahwa PAD masih belum dapat berkontribusi besar terhadap total pendapatan daerah sehingga hal ini mengakibatkan kemampuan PAD relatif kurang maksimal dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah rendah dan sangat rendah karena besarnya dana perimbangan yang diterima dibandingkan dengan PAD yang dipungut mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat. Efektivitas PAD sangat efektif dan efektif maka hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah tersebut gencar untuk dapat terus mencapai target atau melampaui target PAD yang telah ditetapkan. Efisiensi keuangan daerah bervariasi terlihat ada yang cukup efisien, kurang efisien dan tidak efisien, jika cukup efisien maka anggaran tersebut berimbang, jika kurang efisien maka anggaran tersebut terjadi defisit yang kecil dan tidak efisien maka terjadi defisit yang besar. Rasio pertumbuhan PAD bernilai positif mengakibatkan PAD yang diterima setiap tahunnya selalu meningkat. Jika dihubungkan dengan sektor ekonomi lapangan usaha PDRB, maka daerah kabupaten masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalan yang jika dilihat dari kemandirian keuangan daerahnya terlihat

masih sangat rendah dan rendah kemandirian keuangan daerahnya, sedangkan daerah perkotaan didominasi sektor industri pengolahan dan sektor transportasi dan pengudangan kemandirian keuangan daerahnya cukup, hal ini mengakibatkan kinerja keuangan daerah kota masih lebih baik daripada kinerja keuangan daerah kabupaten.

Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu (1) rasio derajat desentralisasi fiskal secara rata-rata masih sangat kurang pada Kabupaten Kotabaru, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu dan Balangan, dan pada kategori kurang yaitu kabupaten Tanah Laut, Banjar, kota Banjarmasin dan Banjarbaru. (2) rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata tergolong rendah pada kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, dan Tanah Bumbu dan sangat rendah pada kabupaten Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Utara dan Balangan, sedangkan daerah perkotaan yaitu Kota Banjarmasin dan Banjarbaru kemandiriannya sudah cukup baik. (3) Efektivitas PAD secara rata-rata menunjukkan pada seluruh kabupaten/kota sudah baik karena memasuki kriteria sangat efektif dan efektif untuk kota Banjarmasin (4) rasio efisiensi keuangan daerah secara rata-rata menunjukkan kategori kurang efisien pada kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Balangan, dan kota Banjarmasin, kota Banjarbaru dan pada kategori cukup efisien yaitu kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong. (5) Pertumbuhan PAD dari tahun 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan PAD positif.

Saran

Saran untuk pemerintah daerah tersebut agar dapat memperbaiki kinerja pemerintahan daerah terutama kinerja keuangan daerah berupa pengelolaan keuangan daerah dan proses penganggaran yang lebih terencana dengan baik dalam memperbaiki rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut, terutama berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi dalam penyumbang penerimaan PAD agar dapat dilakukan proses ekstensifikasi dan intensifikasi guna meningkatkan penerimaan PAD dan memperbaiki kinerja keuangan daerah berupa meningkatkan derajat desentralisasi fiskal, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, memperbaiki efektifitas PAD, dan meningkatkan efisiensi keuangan daerah menjadi lebih berimbang serta menjaga stabilitas pertumbuhan PAD yang positif. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan alat-alat analisis yang lebih banyak sehingga dapat memerinci penelitian ini menjadi lebih mendalam.

Daftar Referensi

- Bisma, I. D. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* .
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, R. (2006). *Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Mendagri. (1997). *Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Kemendagri.
- Mendagri. (2017). *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia* , 04 (02).
- Negeri, D. D. (1991). *Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Litbang Depdagri.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Pasir Pengairan* .
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT. RajaGrafindo.